

**Bidang Unggulan: Konflik dan Perdamaian
Kode>Nama Rumpun Ilmu:593/Hubungan Internasional**

**PROPOSAL TAHUN KE-2
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**DESIMINASI MODEL
PENINGKATAN KAPASITAS
ORGANISASI EKSTRA KAMPUS
DALAM MENDISKURUSKAN RADIKALISASI AGAMA
DAN POLITIK UNTUK MENANGGULANGI
PENYEBARAN AKSI RADIKAL
DI KAMPUS DI YOGYAKARTA**

**Ketua
Ali Muhammad, Ph.D
NIDN. 0031077101
Anggota
Dr. SURWANDONO
NIDN. 0502057101**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
SEPTEMBER, 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pelaksanaan Diskursus Deradikalisasi Gerakan Politik-Keagamaan Pada Organisasi Ekstra Kampus Untuk Menanggulangi Penyebaran Aksi-Aksi Radikal di Kampus Di Yogyakarta

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : ALI MUHAMMAD
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
NIDN : 0031077101
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Nomor HP : 082127170004
Alamat surel (e-mail) : alim_umy@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : SURWANDONO S.Sos, M.Si
NIDN : 0502057101
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 75.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 278.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fisiol



(Ali Muhammad, Ph.D)
NIP/NIK 1971107312005011001

Yogyakarta, 7-9-2016
Ketua,



(ALI MUHAMMAD)
NIP/NIK 1971107312005011001

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya modul peningkatan kapasitas organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan deradikalisasi gerakan politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus, desiminasi modul peningkatan kapasitas organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan deradikalisasi gerakan politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus, desiminasi artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau konferensi internasional.

Pengambilan lokasi penelitian di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan semakin seringnya artikulasi gerakan politik dan keagamaan dimanifestasikan dalam pemikiran dan aksi politik radikal di kampus-kampus di Yogyakarta. Untuk memperoleh obyektifikasi, penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif, untuk mengeksplorasi pengalaman yang berstruktur dari para aktivis organisasi ekstra kampus dalam mengelola diskursus pemikiran dan aksi politik-keagamaan

Populasi penelitian ini adalah pengurus organisasi kemahasiswaan yang bergabung dalam kelompok Cipayung maupun non Cipayung di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil sampel penelitian melalui metode *purposive random sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan *focus group discussion* kepada pengurus organisasi Ekstra Kampus di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan analisis wacana (*discourse analysis*) untuk melihat derajat pengetahuan dan pengalaman pengurus Organisasi Ekstra Kampus dalam mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal. Untuk menyusun modul pelebagaan diskursus deradikalisasi gerakan politik dan keagamaan bagi Organisasi Ekstra Kampus akan dilakukan penelitian pustaka dan konsultasi pakar organisasi ekstra kampus maupun pakar deradikalisasi pemikiran.

Key Words: Deradikalisasi, Pemikiran Politik dan Keagamaan, Organisasi Ekstra Kampus

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan pemikiran keagamaan dan politik yang berkarakter radikal berkembang dengan pesat di Indonesia dan telah menjadi ancaman yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya frekuensi kekerasan dan terror yang dilakukan oleh kelompok keagamaan dan politik yang berkarakter radikal terhadap kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat secara umum, seperti teror bom mobil, bom bunuh diri maupun bom buku maupun gejala “pencucian otak”. Dari serangkaian aktivitas terror tersebut, ada kecenderungan menempatkan anak muda sebagai target yang dipilih oleh kelompok radikal tersebut sebagai sarana untuk mengartikulasikan eksistensinya.

Dunia kampus yang dibangun dengan tradisi intelektualitas dan rasionalitas ternyata juga mampu diinfiltrasi oleh kelompok radikal. Beberapa mahasiswa di kampus di Malang, Yogyakarta, Jakarta dan Bandung telah direkrut menjadi anggota dari jaringan kelompok radikal. Menurut Prof Sukemi, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Pendidikan Nasional, maupun Johannes Frederik Warouw, Sosiolog Universitas Indonesia menyatakan bahwa para agen pemikiran keagamaan dan politik radikal memilih target mahasiswa yang cerdas dan memiliki idealisme tinggi untuk direkrut menjadi bagian dari kelompok radikal tersebut. Perkembangan kondisi ini memerlukan perhatian yang sangat serius dari kampus untuk melakukan serangkaian kebijakan dan program deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di lingkungan kampus secara sistematis.

Organisasi ekstra kampus memiliki potensi luar biasa untuk ditempatkan sebagai agen deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di tengah gagalnya berbagai program deradikalisasi dirilis oleh pemerintah. Dalam sejarah politik dan keagamaan di Indonesia, organisasi ekstra kampus memiliki kontribusi besar untuk menyelesaikan problem kebangsaan di tingkat kemahasiswaan melalui aktivitas intelektual yang intensif dan maupun di tingkat nasional melalui aktivitas intelektual dan politik yang cerdas. Program deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik dengan menggunakan organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi diharapkan dapat menyelesaikan problem radikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di tingkat kampus maupun di masyarakat.

I.2. Tujuan Khusus

Penelitian tentang pelebagaan diskursus deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik pada organisasi ekstra kampus memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Memetakan strategi pelebagaan program deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik yang efektif di kampus dengan menempatkan organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi.
- 2) Mengembangkan modul pelebagaan diskursus deradikalisasi gerakan keagamaan dan politik pada organisasi ekstra kampus.
- 3) Menyusun modul pelebagaan diskursus deradikalisasi gerakan politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus.
- 4) Dan mensosialisasikan modul tersebut kepada pengurus organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di kampus.

I.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian tentang pelebagaan diskursus deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik dengan menempatkan organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik memiliki beberapa urgensitas:

Pertama, meningkatnya budaya intoleransi di masyarakat yang ditandai meluasnya penyebaran pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal-kekerasan, baik di masyarakat maupun di dunia kampus. Penyebaran pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal telah melahirkan beragam kekhawatiran di tengah masyarakat terkait dengan pilihan artikulasi untuk mencapai kepentingan menggunakan instrument-instrumen kekerasan dibandingkan dengan artikulasi secara moderat dan dialogis. Semakin seringnya artikulasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok politik dan keagamaan telah menyebabkan kegelisahan dan ketakutan di masyarakat untuk melakukan aktivitas politik, social, dan ekonomi.¹

Kedua, maraknya penyebaran pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal di kampus-kampus di Indonesia. Dalam konteks pemikiran ilmu social di dunia kampus, pilihan untuk mengembangkan cara berfikir secara radikal untuk memahami fenomena social sesungguhnya sebagai sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan

¹ Lihat ragam kekerasan pemikiran politik dan keagamaan dalam Endang Turmudi, dan Sihbudi, R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta, LIPI Press).

asumsi besar bahwa berfikir secara radikal akan memberikan kesempatan untuk berfikir secara komprehensif untuk menemukan sumber masalah secara lebih akurat dan menemukan solusinya dibandingkan dengan proses berfikir yang hanya bersifat artificial. Paradigma kritis dalam ilmu social bahkan menganggap bahwa berfikir secara radikal adalah jawaban untuk memecahkan berbagai problem social yang selama ini tidak terselesaikan. Yang kemudian menjadi masalah adalah manakala radikalisme berfikir tersebut juga tercermin dalam radikalisme tindakan yang melakukan hegemoni cara berfikir dan melakukan tindakan kekerasan untuk mengartikulasikan pemikiran. Penyebaran pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal-kekerasan dikhawatirkan akan mengancam tradisi akademik berupa obyektivitas dan rasionalitas dalam memandang suatu persoalan dan diganti dengan tradisi absolutisme dan hegemonisme.²

Ketiga, belum efektifnya program deradikalisasi yang telah dirilis oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal kekerasan di tengah masyarakat maupun di kampus-kampus. Ketidakberhasilan program deradikalisasi sedikit banyak ditentukan oleh pola, muatan, subyek dan obyek deradikalisasi yang cenderung tidak sistematis. Pola deradikalisasi yang lebih banyak mengedepankan logika doktriner hokum, konstitusi dan militer, muatan deradikalisasi yang cenderung tidak partisipatif (top down), bahkan terkadang difahami sebagai bagian dari pendangkalan keberagaman seseorang, subyek deradikalisasi yang dilakukan oleh petugas formal dengan jumlah yang sangat terbatas dan bukan dilakukan oleh orang-orang memiliki hubungan personal, yang kemudian menyebabkan derajat kelekatan menjadi sangat artificial, dan obyek deradikalisasi yang hanya terbatas, menyebabkan proses banyak kalangan yang sesungguhnya memiliki tradisi pemikiran radikal namun tidak berada dalam unit untuk dideradikalisasi menjadi tidak tersentuh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pelebagaan diskursus deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus di Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

² Lihat dalam Sri Yunanto, *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara*, [Islamic militant movement: in Indonesia and Southeast Asia]. Jakarta: Ridep Institute, 2003

Pertama, memberikan alternative model untuk mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan yang efektif untuk dipergunakan di kalangan mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya. Deradikalisasi dengan mempergunakan konsep *peer assessment* memungkinkan program deradikalisasi dapat berjalan secara obyektif, rasional dan menyenangkan sehingga dapat diterima oleh banyak kalangan

Kedua, memperkuat kapasitas organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan. Peningkatan kapasitas organisasi kampus dalam mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan diharapkan dapat memberikan efek bola salju bagi terbangunnya karakter masyarakat kampus yang inklusif dalam mengartikulasikan pemikiran politik dan keagamaan.

Ketiga, mengurangi dan meminimalisir tindakan radikal dan kekerasan dari mahasiswa terhadap mahasiswa lainya maupun terhadap masyarakat. Terinstitusionalisasinya diskursus deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus dalam jangka pendek diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi terciptanya tertib social dalam mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan di kampus. Dan di jangka panjang, dengan terinstitusionalisasinya diskursus deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus akan turut membantu penyelesaian problem radikalisasi di tengah masyarakat.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Radikal merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*radict*” yang artinya dasarnya adalah akar. Merujuk dari kamus Bahasa Indonesia, radikal didefinisikan sebagai kecenderungan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu secara mendasar. Sedangkan radikalisasi merupakan tindakan yang menimbulkan sikap radikal di tengah masyarakat.³ Lembaga Survei Indonesia (LSI), mengadakan riset nasional, untuk mengeksplorasi radikalisme pada tingkat muslim dewasa di Indonesia di tahun 2010. Dalam riset ini diperoleh data mengenai masyarakat yang pernah dan bersedia melakukan tindakan radikal sebagai berikut:

Tabel 1
Ragam Tindakan Yang Mengekspresikan Kecenderungan Radikal

| No | Tindakan | Prosentase |
|----|---|------------|
| 1 | Razia dan Sweeping tempat maksiat | 2,6% |
| 2 | Bersedia Melakukan razia dan sweeping tempat maksiat | 26,3% |
| 3 | Demonstrasi Terhadap Kelompok Lain | 1% |
| 4 | Bersedia Melakukan Demonstrasi Terhadap Kelompok lain | 26,9% |
| 5 | Menyumbang Materi Untuk Penegakan Syariat Islam | 37,4% |
| 6 | Melakukan Penyerangan Rumah Ibadah | 1,3% |
| 7 | Mengajak Orang lain agar mengikuiti pemikirannya | 18,8% |

Sumber: Lembaga Survai Indonesia, 2010.

Pemikiran radikal memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap kelompok anak muda dan kelompok mahasiswa. Studi yang dilakukan oleh Surwandono dan Sidiq Ahmadi terhadap gejala tumbuhnya pemikiran radikal cukup menarik yakni aktivis organisasi ekstra kampus lebih tertarik untuk mendiskusikan kepada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat diametral, apakah kanan-politik (fasisme, totalitarianism), kanan-agama (fundamentalisme), kiri-politik (sosialisme, komunisme), kiri-agama (kiri Islam, teologi pembebasan), maupun liberal politik (liberalism), maupun liberal agama (liberalisasi)⁴ daripada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat moderat. Pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat ekstrim difahami akan memberikan

³ <http://sosbud.kompasiana.com/2010/12/10/urgensi-deradikalisasi-di-indonesia/> yang diunduh pada 12 April 2011 atau untuk kajian lebih dalam tentang radikalisme dalam Zada, K. (2003). *Islam radikal: Pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia* Jakarta: Teraju.

⁴ Lihat klasifikasi spectrum pemikiran politik dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Penerbit Radjawali, 2003

horizon berfikir yang luas sehingga akan ditemukan solusi-solusi atas persoalan social politik yang selama ini mengalami kebuntuan karena sempitnya horizon berfikir. Pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal juga dianggap sebagai narasi yang paling efektif untuk melakukan counter hegemoni terhadap dominannya pemikiran global yang berbasis liberalis-kapitalis.⁵

Dalam konteks politik di kampus, studi dari Surwandono dan Sidiq Ahmadi menunjukkan bahwa organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan pemikiran keagamaan dan politik cenderung memilih struktur pemikiran politik yang berbasis radikal kritis, yang terdiri dari;

Pertama, Pemikiran-pemikiran **politik yang berbasis kiri**, baik yang kiri radikal maupun kiri kritis,⁶ menjadi salah satu referensi utama dari hampir semua organisasi ekstra kampus. Pilihan untuk mengkonsumsi pemikiran yang berbasis kiri, dalam banyak kasus sebagai pilihan yang tak terhindarkan di tengah semakin derasnya pemikiran politik liberal yang diadopsi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kedua, pemikiran politik yang berbasis **kanan keagamaan**, baik yang bersifat moderat-adaptif dan radikal-revolusioner sedemikian rupa juga menjadi alternative sumber pemikiran. Pemikiran kanan revolusioner yang memandang sesuatu secara diskrit, difahami oleh beberapa aktivis organisasi ekstra kampus sebagai alternative eksplanasi realitas social yang yang rumit dan kompleks menjadi lebih sederhana.⁷

Ketiga, corak pemikiran radikal bebas, di mana kemudian menempatkan sesuatu *rule of law* sebagai sesuatu yang nisbi. Filsafat eksistensialisme yang menjadi rujukan semangat radikal dalam kebebasan ini menyebabkan segala tindakan agen dan struktur dalam masyarakat dikelola dengan hukum *permisivisme*. Filsafat eksistensialisme ini menjadi rujukan berfikir juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi organisasi ekstra kampus yang mulai sepi peminat. Mengembangkan pemikiran yang berwatakan radikal

⁵ Surwandono, Sidiq Ahmadi, Pelembagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskusikan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta, Laporan Penelitian Hibah Bersaing (tidak diterbitkan), Yogyakarta, Fisipol UMY, 2010

⁶ Karl Mark, Frederich Engel sebagai basis normative pemikiran kiri kritis, yang kemudian muncul pemikiran kiri dari Hasan Hanafi, Moh Arkoun , ataupun pemikiran revolusioner seperti teologi pembebasan yang dibawa oleh Castro, maupun Che Guevara.

⁷ Lihat pemikiran kanan keagamaan radikal dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 2003 ataupun dalam Muhammad Asfar (ed). *Islam lunak, Islam radikal: Pesantren, terorisme, dan bom Bali*, Surabaya: JP Press.

permisivisme difahami akan memberikan daya undang yang besar sehingga mahasiswa tertarik untuk bergabung dengan organisasi ekstra kampus.

Tumbuh dan berkembangnya pemikiran radikal di kampus, pada awalnya tidak menyebabkan persoalan yang serius. Berfikir radikal Yes, Bertindak Radikal No, demikian jargon yang sering diaktualkan oleh para aktivis organisasi ekstra kampus dalam melakukan diskursus pemikiran. Namun akhir-akhir ini, gejala radikalisasi pemikiran di kampus mengalami perubahan yang signifikan di mana terdapat sekelompok aliran politik dan keagamaan melakukan infiltrasi pemikiran radikal kepada para mahasiswa. Hasilnya cukup mengejutkan banyak kalangan, bahwa banyak mahasiswa menjadi korban dari indoktrinasi pemikiran dan aksi radikal dari kelompok politik dan agama tertentu. Bahkan para pelaku tindak kekerasan dan terror di Indonesia pada tahun 2010-2011 diperankan oleh para mahasiswa maupun sarjana yang baru lulus dari kampus.⁸

Meningkatnya aktivitas intoleransi, kekerasan dan terror di Indonesia mencerminkan bahwa banyaknya anggota masyarakat yang terpengaruh oleh logika berfikir dari kelompok radikal dan melakukan aktivitas intoleransi, kekerasan, terror atas nama kekuatan agama dan politik tertentu adalah sebagai sesuatu yang normal. Bahkan studi yang dilakukan oleh Petrus Golose, Ketua BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menunjukkan bahwa para pelaku tindakan kekerasan dan terror tidak merasa takut atas ancaman hukuman jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁹

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan serangkaian program untuk menata dan mengendalikan ideologi radikal, kekerasan dan terror dengan program deradikalisasi. Menurut Sri Yunanto program deradikalisasi mencakup berbagai komponen proses; deideologisasi reorientasi, motivasi, re-edukasi, resosialisasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Maka program deradikalisasi sebagai sebuah program pendidikan bisa mempunyai dimensi kognitif, dalam bentuk memasukkan faham yang tidak radikal untuk menghilangkan atau melepas pemikiran, sikap dan tindakan radikal dan kemudian menggantikannya dengan

⁸ Dalam diskursus kekinian, kelompok politik keagamaan tersebut dihubungkan dengan kelompok NII. Lihat lebih jauh dinamika pemikiran radikal dalam ⁸ Shireen T Hunter, *Islamic Revivalism: Unity and Diversity*, Bloomington, 2003, Azyumardi Azra, *ibid*.

⁹ Lihat studi Petrus Golose, *Deradikalisasi terorisme : humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010

faham Islam yang toleran, compatible dengan kehidupan bangsa yang plural. Program deradikalisasi juga mempunyai dimensi afeksi, yaitu melakukan persuasi dengan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi agar mereka dengan sadar dan senang kembali kepada masyarakat, Islam dan motorik dalam bentuk meninggalkan perilaku dan dukungan terhadap kekerasan.¹⁰

Studi yang dilakukan oleh Sri Yunanto terhadap program deradikalisasi justru menimbulkan persoalan serius, bahkan semakin memicu penyebaran pemikiran radikal. Selama ini program deradikalisasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan keamanan, dan pendekatan penegakan hukum dan kurang menggunakan pendekatan melalui jalur budaya dan pendidikan relative belum banyak dieksplorasi. Pendekatan keamanan dan hukum cenderung mengedepankan unsur represif, sedangkan pendekatan budaya dan pendidikan mengedepankan unsure preventif dan humanis.

Ketua Majelis Ulama KH Makruf Amien yang mengatakan bahwa program deradikalisasi yang salah justru akan memicu radikalisme¹¹ Hal ini terkait dengan adanya pandangan bahwa program deradikalisasi merupakan sebuah program karet untuk memarginalkan peran politik masyarakat Islam, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan pendangkalan akidah bagi kalangan umat Islam. Kebijakan deradikalisasi yang tidak dipersiapkan secara matang justru akan menimbulkan mis-interpretasi dan mis-komunikasi yang berpeluang menciptakan radikalisasi sendiri.¹² .Noorhuda Ismail, mempunyai sikap yang skeptis terhadap konsepsi deradikalisasi dalam perspektif mengubah pemikiran yang radikal. Dalam pandangannya yang lebih penting bukan merubah pemikiran yang radikal melainkan membuat mereka mandiri secara ekonomi dan menjauhkan diri dari kekerasan (disengagement from violence).¹³

¹⁰ Lihat tulisan Sri Yunanto, . (ed). (2003). *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: Ridep Institute. Atau dalam <http://idsps.org/headline-news/publikasi-idsps/tantangan-program-deradikalisasi-terorisme/>, yang diunduh pada 15 April 2011

¹¹ Republika, Senin 1 November 2010.

¹² Hal ini tercermin dalam sikap Hizbut Tahrir Indonesia dalam mengomentari program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Lihat pandangan HTI, Harist Abu Ulya, **Latar Belakang Munculnya Strategi Deradikalisasi** (Menguak Target dan Tujuan Yang Sebenarnya), dalam <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/latar-belakang-munculnya-strategi-deradikalisasi.htm> yang diunduh pada 10 April 2011

¹³Republika, Rabu , 6 Oktober 2010

Salah satu model deradikalisasi yang berhasil menurut Leo Suryadinata adalah program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Belanda dalam batas tertentu berkontribusi terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia, di mana tokoh Sneevliet merupakan tokoh dari Belanda yang mengenalkan tradisi radikalisme di Indonesia. Pandangan Sneevliet kemudian mengubah struktur social dalam organisasi Sarekat Islam yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto menjadi terpecah dalam organisasi SI Putih di bawah kepemimpinan Agus Salim, dan SI Merah di bawah kepemimpinan Semaun.

Menurut Leo Suryadinata, program deradikalisasi yang didesain oleh pemerintah Belanda dengan melibatkan para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama. Froukje Demant merupakan peneliti radikalisme yang terkenal. Dia menyarankan agar pemerintah Belanda yang sekuler lebih terbuka untuk argumen-argumen religius dan kaum muslim moderat harus mengajak sesama muslim yang radikal masuk ke *mainstream* Islam yang damai. Pemberian ruang kepada fihak-fihak yang akan menjadi obyek deradikalisasi untuk menyampaikan argumentasi dari keyakinan yang dipilihnya akan membuat arus keterbukaan komunikasi.¹⁴

Bagaimana mendesain program deradikalisasi yang efektif dan efisien?. Proses melakukan deradikalisasi dapat meminjam logika konstruktivisme yang dipergunakan oleh Antony Giddens untuk melacak relasi antara agen dan struktur. Pemikiran radikal dapat dianalogkan sebagai struktur, dan pelaku aktivitas kekerasan sebagai representasi agen. Struktur pemikiran radikal membentuk cara pandang dan perilaku agen dalam memaknai sesuatu. Struktur yang kuat dan berhirarki membuat agen tidak memiliki kesempatan untuk mengabaikan apa-apa yang meniadakan harapan dan keinginan agen. Semakin terjadi ketimpangan kekuatan, otoritas, informasi antara struktur dan agen maka semakin posisi agen hanya menjadi sub ordinat dari kepentingan struktur. Menurut Giddens, dalam konteks tertentu perilaku struktur dapat dipengaruhi oleh perilaku agen, atau dalam hal ini agen justru yang mengkonstruksi perilaku struktur. Agen yang memiliki kekuatan yang memadai, memungkinkan perilaku agen akan otonom, bahkan agen dapat

¹⁴ Lihat pandangan Leo Suryadinata dalam http://www.balipost.co.id/mediadeta_il.php?module=detailrubrik&kid=1&id=2490 yang diunduh pada 1 April 2011

mempengaruhi perubahan di dalam struktur sehingga perilaku agen kemudian berharmoni dengan perilaku struktur.¹⁵

Peneliti telah melakukan serangkaian riset yang terkait dengan diskursus pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal. Pada tahun 2005, peneliti telah melakukan riset tentang fenomena gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Dari penelitian tersebut menghasilkan beberapa temuan penting;

Pertama, terdapat pertumbuhan yang signifikan gerakan politik keagamaan berbasis radikal pasca reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998. Pertumbuhan tersebut dalam batas tertentu membuat semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya. Seperti artikulatifnya kelompok salafi yang membentuk Laskar Jihad yang memobilisasi potensi masyarakat Islam untuk turut serta dalam membantu komunitas Islam yang termarginalkan di Poso, Ambon. Kelompok Salafi, yang dipimpin oleh Ustadz Jafar Umar Thalib sebelumnya merupakan kelompok keagamaan yang bersifat apolitik, dan tidak banyak terlibat dalam diskursus politik secara langsung. Munculnya organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, yang mengorganisir potensi umat Islam untuk mengartikulasikan pentingnya penegakan syariah dalam kehidupan social dan politik di Indonesia.

Kedua, gerakan-gerakan social keagamaan dan politik yang berbasis radikal senantiasa menyatakan bahwa tidak terkait dengan aktivitas-aktivitas terror seperti terror bom Bali I dan II, maupun bom Kuningan, Marriot dan aktivitas terror lainnya. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dituduh terlibat dalam aktivitas tersebut tidak terbukti di persidangan terlibat dalam perencanaan aksi terror tersebut, dan mendapatkan hukuman dalam perkara pelanggaran imigrasi.

Penelitian tentang relasi dinamika pemikiran radikal dan terorisme mulai peneliti lakukan dalam kesempatan Riset di National University of Singapore yang diberikan pendanaan dari program ARI (*Asian Riset Institute*), dengan menfokuskan kepada kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi maraknya aktivitas terorisme di Indonesia dengan judul "*An Ideological Approach to Counterterrorism: the Indonesia's*

¹⁵ Lihat Antony Giddens dalam Antony Giddens *Central Problems in Social Theory*, Berkeley: University of California Press, 1979 dan Anony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge, U.K.: Polity Press, 1984. Atau dalam Lihat dalam Alexander E. Wendt, "*The Agent-Structure Problem in International Relations Theory*", *International Organization*, Vol. 41, No. 3. (Summer, 1987), pp. 335-370

Experience” paper presented at 3rd graduate forum at the ARI, the National University of Singapore (NUS), 28—29 July 2008.

Peneliti menemukan temuan penting terkait dengan kebijakan counter terrorism yang dilakukan pemerintah, di mana pemerintah cenderung menggunakan pendekatan ideologis dalam menghambat laju pertumbuhan pemikiran terorisme. Hal ini ditandai dengan pilihan pemerintah Indonesia untuk memberikan program deradikalisasi kepada para narapidana kasus terorisme, dibandingkan dengan aktivitas represif-militeristik. Dari sekitar 30 pelaku tindak terorisme, hanya 3 orang saja yang dijatuhi hukuman mati, yakni Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Imron. Sedangkan yang lainnya mendapatkan hukuman seumur hidup seperti Ali Gufron dan sebagian besar lainnya mendapatkan hukuman antara 5-8 tahun.

The growth of extremist ideology in the community could be used by a terrorist group to find new recruits for their actions or suicide bombing missions.¹⁶ Failure to neutralize the ideological motivation would mean that terrorist networks could suffer bodily losses at the hands of security forces, but still replenish their ranks with ideologically committed fresh recruits from the wider constituency.¹⁷

Dalam pandangan pemerintah Indonesia, deradikalisasi di rumah tahanan diasumsikan akan dapat mengubah cara pandang pelaku terror dalam memandang fenomena social. Sehingga setelah menjalani masa hukuman, para terdakwa kasus terorisme dapat kembali ke masyarakat dan hidup berdampingan secara damai. Program deradikalisasi di rumah tahanan, ternyata tidak banyak menghasilkan perubahan yang berarti kepada cara pandang terpidana kasus terror. Dalam studi yang dilakukan oleh Noor Huda Ismail, program deradikalisasi di rumah tahanan seringkali dilakukan secara tidak sistematis dan terkesan menggurui, menyudutkan sehingga justru seringkali melahirkan penolakan dari terpidana kasus teroris.¹⁸

Peneliti juga melakukan kajian serius tentang pilihan pemerintah Indonesia dalam kebijakan counter terrorism. Hasil kajian ini kemudian penulis presentasikan dalam

¹⁶ The Second Bali Bombing on October 1, 2005 was perpetrated by new recruits, i.e. Misno, Salik Firdaus and Eep Hidayat, who were inspired by an extremist understanding of *Jihad*. Before their suicide mission, Muhammad Salik Firdaus conveyed the last messages recorded in the VCD saying that “He will go directly to the heaven after the mission” based on Al-Quran Surah Al Imran: 169.” Bambang Abimanyu, *Terror Bom Azahari -Noor Din*, (Jakarta, Republika, 2006), 28-31.

¹⁷ Kumar Ramakrishna, “It’s the Story, Stupid,...128.

konferensi internasional di Korea Selatan, pada bulan Agustus 2009, dengan judul: *“Between International Pressures and Domestic Constraints: Indonesia’s Counterterrorism Policy.”* Dalam paper ini penulis melakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam melakukan counter terrorism, Pertama, pilihan kebijakan Indonesia untuk melakukan kebijakan counter terrorism tidak bisa dilepaskan dari dirkursus politik internasional yang menempatkan terorisme sebagai musuh bersama Negara-negara di dunia yang selama ini dibangun oleh AMerika Serikat pasca pemboman 11 September 2001, dan peboman di Bali tahun 2003.

the United States was the sole super power in current world politics that, during the Bush administration, declared its so-called “Global War on Terror” in the aftermath of the 9/11 tragedy. No country can escape from the influences of the new global political environment. The US assertively demanded the international community to take part in the fight against Al-Qaeda and its affiliates and exerted pressures on any countries that were reluctant to participate.¹⁹

Pilihan kebijakan Indonesia dalam mendesain kebijakan counter terrorism tidak dapat dilepaskan dari kombinasi kebutuhan dari pemerintah Indonesia dan kekuatan internasional. Tekanan kekuatan internasional yang akan memberikan fasilitas yang memadai untuk membangun struktur keamanan, ekonomi di Indonesia melalui jalur-jalur diplomatic dan ditambah dengan semakin meningkatnya aktivitas terror di Indonesia, menjadi kombinasi variable penting dalam strategi dan implementasi kebijakan anti terrorism.

combination of instruments—in the form of intensive diplomatic channels, economic inducements, technical assistance as well as the promise to lift the military embargo—were used to compel this “reluctant partner” to follow the American lead. They urged the Indonesian government to take crucial counterterrorism measures, among others including to adopt anti-terrorism laws; to arrest the suspected terrorists and the “JI spiritual leader” wanted by the US; and to ban the AJAI as a terrorist organization. International pressure on Indonesia shaped significantly the route of the government’s counterterrorism policy.²⁰

Peneliti kedua juga telah melakukan riset mendalam tentang bagaimana mendiskusikan sebuah wacana “Fiqh Perbedaan “untuk diinternalisasikan ke dalam

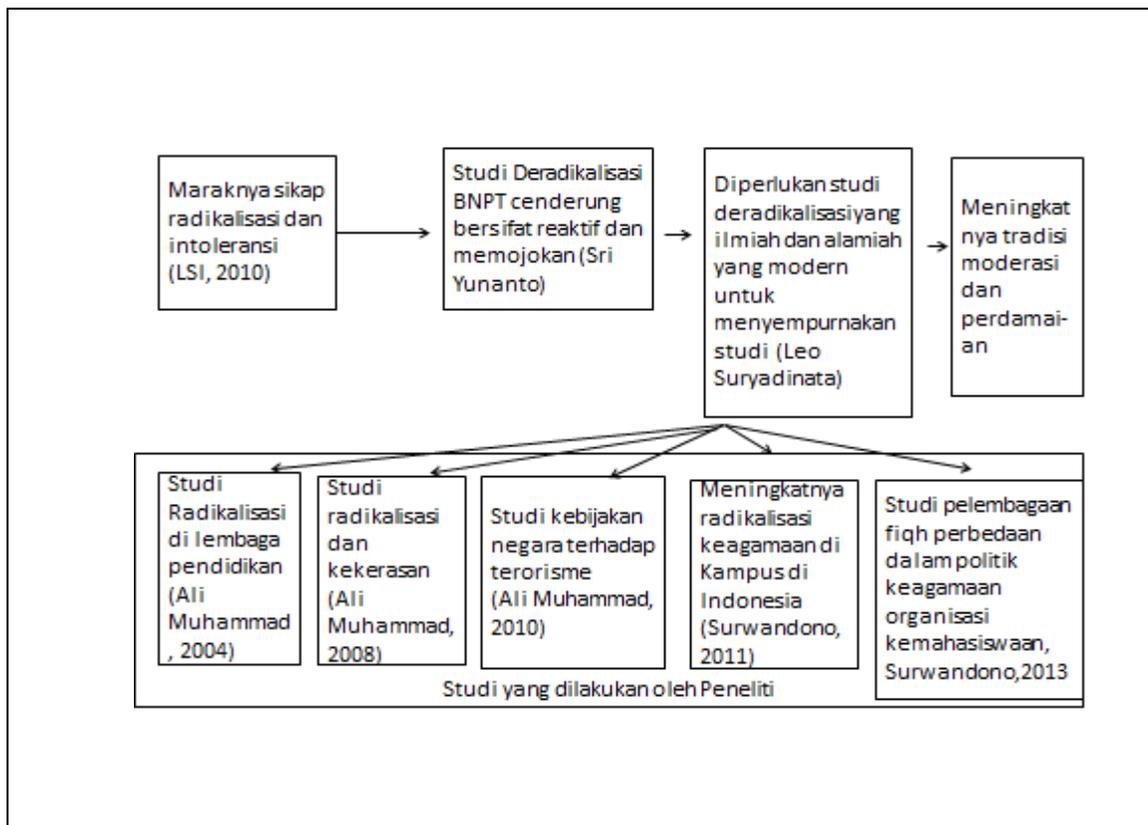
¹⁸ Lihat dalam Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris?: Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan Berbeda*, Jakarta, Hikmah, 2010, 318

¹⁹ Lihat Dalam Ali Muhammad, *Indonesia’s Counterterrorism Policy, 2001—2009*, Dissertation In International Islamic University Malaysia, April 2011, hal. 213

²⁰ Ibid. hal . 214

supra struktur organisasi kemahasiswaan dengan menggunakan instrument modul dan buku pegangan. Riset menemukan hubungan positif antara pelembagaan fiqh perbedaan dengan metode andragogy atau pendidikan orang dewasa, dengan semakin terinternalisasinya nilai fiqh perbedaan, yang kemudian berkontribusi positif dengan semakin berkurangnya penggunaan kekerasan dalam mendiskusikan konflik pemikiran.²¹ Dari sejumlah pengalaman riset yang telah penulis lakukan tentang kebijakan counter terrorism di Indonesia, peneliti memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelusuran lebih jauh dalam studi deradikalisasi sebagai salah satu implementasi kebijakan counter-terrorism yang menggunakan pendekatan budaya dan pendidikan. Pemaknaan peneliti terhadap berbagai variasi kebijakan counter terrorism harus bersinergi satu sama lain, sehingga produktivitas kebijakan counter terrorism akan lebih besar. Untuk melakukan riset pelembagaan diskursus deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di Kampus dengan menempatkan organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi akan dilakukan seperti bagan berikut:

Peta Jalan Penelitian Riset



²¹ Surwandono, *Mengartikulasikan Fiqh Perbedaan Dalam Dunia Kemahasiswaan*. Jogjakarta, NFP

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mentransformasi kapasitas Organisasi Ekstra Kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di kampus-kampus di Yogyakarta. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan penjelasan yang akurat tentang posisi penyebaran pemikiran radikal di kalangan mahasiswa, derajat radikalisasi pemikiran dan proses untuk melakukan deradikalisasi;

Teknik pengumpulan data

Data penelitian diperoleh melalui data primer dengan melakukan *interview* terstruktur kepada responden yakni aktivis organisasi ekstra kampus maupun kepada narasumber dan pakar. *Focus group discussion* dilakukan kepada pengurus Organisasi Ekstra Kampus, dan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen, buku-buku, gambar-gambar yang terkait dengan issue radikalisme dan deradikalisasi..

Teknis analisis data

Teknis analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, analisa isi dan wacana secara simultan untuk digunakan menganalisis buku-buku, dokumen sejarah Organisasi Ekstra Kampus, dokumen pemaknaan terhadap kitab suci, dokumen-dokumen kebijakan counter terrorism, untuk kemudian bisa diambil makna terdalam dari pesan yang disampaikan.

Kedua, untuk mendapatkan analisis yang mendalam terhadap dari hasil wawancara dengan narasumber maupun responden dalam penelitian, maka akan dilakukan analisis fenomenologis, dan dan untuk menginterpretasi hasil dari pelaksanaan *focus group discussion*, maupun pelaksanaan *expert meeting* akan mengeksplorasi dengan menggunakan analisis simbolik.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah aktivis organisasi ekstra kampus berbasis keagamaan di Yogyakarta, seperti HMI MPO, HMI DIPO, IMM, PMII, KAMMI yang tergabung dalam kelompok Cipayung ataupun organisasi ekstra kampus berbasis keagamaan seperti kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Jamaah Tabligh, kelompok Salafi, maupun beberapa variannya melalui *stratified random sampling*, untuk meningkatkan derajat representasi dari obyektivitas penelitian.

Lokasi penelitian

Pengambilan lokasi penelitian di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk pengambilan data dan desiminasi modul dari pelebagaan deradikalisasi politik keagamaa pada organisasi kemahasiswaan. Sedangkan untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang radikalisme dan deradikalisasi di Jakarta dan Solo.

Rancangan Penelitian

| No | Aktivitas | Tujuan | Tehnik Pengumpulan Data | Tehnik Analisis Data | Luaran | Tahun Implementasi |
|----|--|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Mengidentifikasi pola-pola mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan berbasis radikal di kalangan mahasiswa. | Mengetahui pola-pola pemikiran dan penyebaran pemikiran radikal di kampus | Wawancara, Studi Dokumen | Interpretatif Analisis Wacana | Laporan Riset dan Artikel Jurnal | Tahun Pertama |
| 2 | Mengidentifikasi pandangan organisasi ekstra kampus terhadap munculnya pemikiran keagamaan dan politik mahasiswa yang berbasis radikal. | Mengetahui sikap organisasi ekstra kampus terhadap penyebaran pemikiran dan aksi radikal di kampus | Wawancara | Interpretatif | Laporan Riset, | Tahun Pertama |
| 3 | Memetakan strategi pelebagaan program deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik yang efektif di kampus dengan menempatkan organisasi ekstra | Mengetahui strategi yang efektif dalam mendiskusikan deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di kalangan mahasiswa | Wawancara Studi dokumen | Interpretatif Analisis isi | Model Pelebagaan Deradikalisasi | Tahun Kedua |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|--|------------|
| | kampus sebagai agen deradikalisasi | | | | | |
| 4 | Mengembangkan modul pelebagaan diskursus deradikalisasi gerakan keagamaan dan politik pada organisasi ekstra kampus. | Mendesiminasiakan pemikiran deradikalisasi secara efektif dan efisien | Studi Dokumen, Wawancara, | Analisis Wacana Interpretatif | Modul Pelebagaan Deradikalisasi | Tahun ke 2 |
| 5 | Menyusun buku pelebagaan diskursus deradikalisasi gerakan politik dan keagamaan pada organisasi ekstra kampus. | Tersebar nya pemikiran tentang deradikalisasi ke masyarakat luas | Studi Dokumen, Wawancara, Focus group discussion, expert meeting | Analisis Wacana | Buku Deradikalisasi: Teori dan Praktik | Tahun ke 3 |
| 6 | Dan mensosialisasikan modul tersebut kepada pengurus organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di kampus | Tersosialisasikan modul dan buku ke stakeholder deradikalisasi pemikiran di kampus | In-House Training | Analisis Wacana | Kultur dan Komunitas Mahasiswa Yang Inklusif | Tahun ke 3 |

BAB VI

PEMBAHASAN

Modul pelebagaan diskusus deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan pada organisasi kemahasiswaan berbasis Islam sudah selesai disusun, dan dalam sedang proses diverifikasi oleh tenaga ahli dari the International Contact Group, sebuah organisasi internasional yang memiliki domain pada pengelolaan issue radikalisisasi dan terorisme. Tenaga Ahli yang melakukan supervise adalah Dr. Navhat Nuraniyah, MA.

Rencana pelaksanaan desminasi untk sejumlah organisasi kemahasiswaan akan dilakukan di bulan Oktober.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2007). *Melawan pemikiran aksi bom Imam Samudera dan Noordin M. Top*. Jakarta: Grafindo.
- Abugabriel, M. et. al, (2004). *Negara Tuhan* Yogyakarta: SR-Ins Publishing, Multi Karya Grafika.
- Aldis, A. and Herd, G. P. (2007). *The ideological war on terrorism: Worldwide strategies for counter-terrorism*. London: Routledge.
- Muhammad Asfar (ed). *Islam lunak, Islam radikal: Pesantren, terorisme, dan bom Bali*, Surabaya: JP Press.
- Azra, Azyumardi, 2003, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Paramadina.
- (2005). Penanggulangan terorisme, *Republika*, 1 Desember.
- Duverger, Maurice, 2003, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Penerbit Radjawali.
- Giddens, Antony, 1979, *Central Problems in Social Theory*, Berkeley: University of California Press, 1979
- , 1984, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge, U.K.: Polity Press.
- Golose, Petrus, *Deradikalisasi terorisme : humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010
- Huda, Noor Ismail, *Temanku Teroris?: Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan Berbeda*, Jakarta, Hikmah, 2010
- Hunter, Shireen T, 2003, *Islamic Revivalism: Unity and Diversity*, Bloomington.
- Jatmika, Sidik, *Terorisme Dalam Novel Pengantin Bom: Tinjauan Sosiologi Sastra*, Jogjakarta, Kanisius, 2011
- Komisi Fatwa MUI. (2006). *Kumpulan fatwa-fatwa actual: Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia. No. 3, 2004, tentang terorisme [On terrorism]*. Jakarta.
- Muhammad, Ali, 2011, *Indonesia's Counterterrorism Policy, 2001—2009*, Dissertation In International Islamic University Malaysia, April
- Rusdi Marpaung & Al Araf (eds). (2003), *Terorisme: Definisi, aksi, dan regulasi*, Jakarta: Imparsial.

- Muradi (2009). The 88th Densus AT: The role and the problem of coordination on counter-terrorism in Indonesia. *Journal of Politics and Law*. Vol. 2 No. 3 September: 85-96
- Sukma, R. (2004). War on terror: Islam and the imperative of democracy. *Asia Europe Journal*, 2: 85-93.
- Surwandono, Sidiq Ahmadi, Pelembagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskusikan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta, Laporan Penelitian Hibah Bersaing (tidak diterbitkan), Yogyakarta, Fisipol UMY, 2010
- Thontowi, J. (2003). *Islam, neoimperialisme, dan terrorism*. Yogyakarta: UII press.
- Thontowi, J. (2003). The Islamic perspective of the war on terrorism and current Indonesian responses. a paper was delivered at the Human Rights 2003: The Year in Review Conference, held by the Castan Centre for Human Rights Law, Monash Law School, Melbourne, 4 December.
- Turmudi, E. and Sihbudi, R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta, LIPI Press).
- Yunanto, S. (ed). (2003). *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara, [Islamic militant movement: in Indonesia and Southeast Asia]*. Jakarta: Ridep Institute.
- Wendt, Alexander E, 1987. "The Agent-Structure Problem in International Relations Theory", *International Organization*, Vol. 41, No. 3.
- Zada, K. (2003). *Islam radikal: Pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia* Jakarta: Teraju.

MODUL

DISKURSUS

DERADIKALISASI

PEMIKIRAN POLITIK DAN

KEAGAMAAN

Dr. Ali Muhammad
Dr. Surwandono



**MODUL
PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAN ISLAM
DALAM MENDISKURSIKAN DERADIKALISASI
PEMIKIRAN POLITIK DAN KEAGAMAAN**

Disusun oleh:
Ali Muhammad, Ph.D
Dr. Surwandono

PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2016

Kata Pengantar

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah demikian banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian hamba-Nya. Atas perkenan-Nya lah, riset berjudul Pengembangan Modul Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Islam dalam Mendiskusikan Deradikalisasi Pemikiran Politik dan Keagamaan di Kampus.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan oleh DP2M Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah memberikan pendanaan terhadap riset ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi para aktivis organisasi kemahasiswaan di tingkat Komisariat, Cabang dan Daerah yang berkenan berbagi informasi melalui diskusi yang hangat dan terbuka tentang issue deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan. Tidak lupa, terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada mahasiswa program Magister Ilmu Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu bersama-sama kami untuk melakukan *interview* kepada para informan, maupun mengolah data yang tentu saja besar sekali kontribusinya bagi terselesainya riset ini.

Riset ini sendiri dimulai dari fenomena maraknya pemikiran politik dan keagamaan radikal yang menggerus nalar ilmiah di dunia kemahasiswaan, yang ditransformasi dengan pemikiran radikal tanpa proses obyektivikasi yang memadai. Kami menyadari bahwa hasil riset ini masih sangat jauh dari sempurna. Namun paling tidak, sedikit tulisan ini semoga dapat menjadi sekedar teman diskusi untuk

mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan radikal secara ilmiah dan obyektif.
Wallahu a'lam bi shawwab.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Modul I | 4 |
| Perkenalan Dan Kontrak Belajar | |
| Modul II | 11 |
| Pengalaman Berstruktur | |
| Modul III | 15 |
| Derradikalisasi | |
| Antara Mitos Dan Fakta | |
| Modul IV | 24 |
| Bentuk-Bentuk De-Radikalisasi | |
| Modul V | 32 |
| Strukturasi Radikalisme Di Kampus | |
| Modul VI | 40 |
| Mendiskusikan De-Radikalisasi Pemikiran Politik Dan Keagamaan Di Kampus | |
| Modul VII | 43 |
| Rencana Tindak Lanjut | |

MODUL I

PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR

Perkenalan , merupakan PONDASI dari proses peningkatan kebersamaan, kepercayaan dan kolaborasi. Kontrak Belajar merupakan langkah untuk membangun kesepakatan yang egaliter guna membangun proses belajar yang kondusif, tertib dan produktif

A. Perkenalan

Tujuan

1. Peserta program saling mengenal dengan peserta yang lain.
2. Peserta program saling percaya dan terbuka dengan peserta lainnya.
3. Terbangun suasana keakraban di antara peserta, fasilitator dan panitia pelatihan

Metode

1. *Kartu Berpasangan*
2. *Simulasi*
3. *Menyanyi*

Waktu

60 menit

Media/Alat bantu

1. Amplop surat
2. Spidol marker
3. Plano
4. Metaplan

Proses

1. Fasilitator membagikan nomor kepada kepada peserta secara berurutan.
2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta aturan mainnya : 1) Fasilitator akan memulai permainan Raja dan Rakyat. 2) Fasilitator menyayikan lagu, Raja(nama) dan diikuti nomor yang ditunjuk 3) Nomor yang terkena segera membalas Nomor diikuti nama dirinya (bias ditambah nama organisasi) kemudian diikuti nomor yang akan dituju
3. Proses ini dilakukan terus menerus sampai waktu 10 sampai 15 menit sesuai kebutuhan
4. Peserta yang gagap atau tidak menyebutkan tata urut dengan benar diberikan hukuman untuk memperkenalkan diri secara lengkap
5. Fasilitator meminta peserta untuk menyebutkan 10-15 nama yang diingatnya

B. Kontrak Belajar dan Siklus Belajar

Tujuan

1. Peserta pelatihan dapat mengemukakan harapan dan kekhawatiran mereka
2. Peserta memahami tujuan pelatihan
3. Peserta membuat kesepakatan tentang proses pelatihan dan bertanggungjawab terhadap proses pelatihan yang sudah disepakati

Waktu

60 menit

Metode

1. Diskusi Kelompok
2. Presentasi

Media/Alat Bantu

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Metaplan
4. Alur Pelatihan

Proses

Fasilitator membagi peserta dalam tiga kelompok. Kelompok 3 kelompok, masing-masing mendiskusikan tentang:

1. Harapan peserta terhadap pelatihan peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan dalam mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan radikal.manajemen radikalisme di sekolah
2. Hambatan yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pelatihan
3. Aturan main pelatihan
4. Aturan main bersama yang disepakati untuk menunjang produktivitas pelatihan

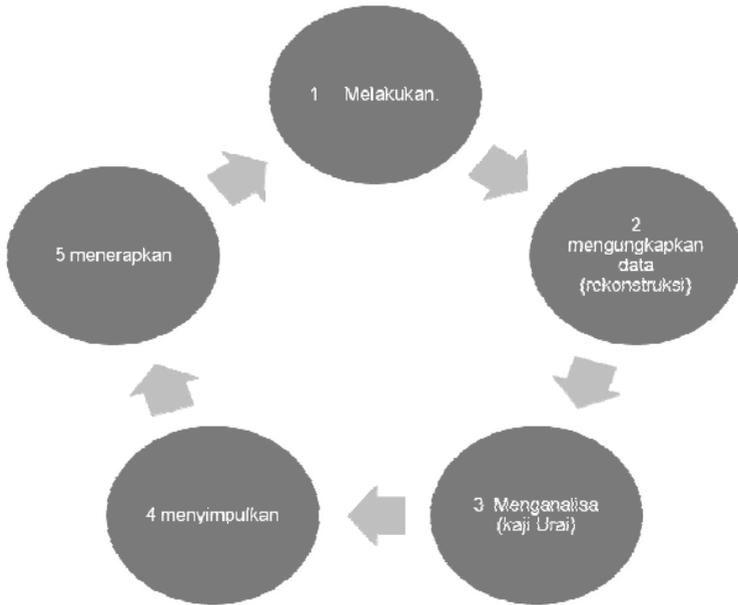
Alur Fasilitasi

1. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang tidak presentasi dipersilakan untuk memperhatikan dan mengajukan pertanyaan.
2. Fasilitator selanjutnya menyampaikan alur pelatihan untuk menjelaskan tentang harapan, kekhawatiran dan kontribusi pelatihan.
3. Fasilitator meminta salah satu peserta untuk menyepakati aturan-aturan selama pelatihan berdasarkan hasil diskusi kelompoknya.

ALUR PELATIHAN



DAUR BELAJAR DAN PELATIHAN



MODUL II

PENGALAMAN BERSTRUKTUR

DESKRIPSI

Modul peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan berbasis Islam dalam mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan radikal di kampus didesain dengan metode partisipatif, di mana pengalaman berstruktur menjadi titik tolak bagi peningkatan kapasitas. Peserta diharapkan akan menjadi peserta yang proaktif dalam menyampaikan berbagai pengalaman, harapan, kekhawatiran yang terkait dengan ruang mendiskusikan pemikiran.

Pengalaman Berstruktur, merupakan kumpulan dari berbagai memori, yang terkait dengan nilai maupun fakta tentang sesuatu, untuk diaktualkan kembali dalam sebuah forum bersama. Forum tersebut akan berperan untuk menjembatani berbagai pengalaman dari peserta untuk kemudian dikonstruksi menjadi nilai bersama dalam mensikapi sesuatu

TUJUAN

Peserta mampu mengartikulasikan berbagai pengalaman, harapan, kekhawatiran dalam mendiskusikan pemikiran secara jujur dan terbuka

METODE

1. Ceramah
2. Studi Kasus
3. Bermain Peran

ALAT-ALAT YANG DIBUTUHKAN

1. Komputer dan Viewer
2. Kertas Plano
3. Kertas Meta Plan
4. Kertas HVS

WAKTU

90 MENIT

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menyampaikan gambaran singkat selama 15 menit tentang pengertian pengalaman berstruktur dalam proses peningkatan kapasitas, dengan mempergunakan alat bantu LCD.
2. Peserta memperhatikan paparan dari fasilitator dan memberikan komentar maupun pertanyaan selama 15 menit.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertutur tentang pengalaman mendiskusikan pemikiran politik dan keagamaan radikal di kampus, dari kekuatan, kelemahan, hambatan, maupun tantangan
4. Peserta menganalisa tentang factor-faktor yang menyebabkan maraknya penyebaran pemikiran politik dan keagamaan radikal di kampus dan alternative penyelesaian yang paling efektif dan efisien.
5. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan, proses analisa ini dapat dilakukan dalam model *role playing*, dalam penyelesaian praktik radikalisme
6. Fasilitator menyiapkan beberapa kata-kata kunci untuk membantu para peserta dalam mengartikulasikan pengalaman dalam pengelolaan dalam mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di kampus

7. Fasilitator menyusun dan mengharmonisasikan pendapat dari peserta, dan kemudian melakukan wrap p bersama.

SISTEM EVALUASI

1. Fasilitator mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta dengan memberikan pertanyaan kepada peserta secara acak untuk pertanyaan essai yang disampaikan secara verbal.
2. Fasilitator mengevaluasi pencapaian peserta dengan memberikan pertanyaan tertulis untuk kemudian direkap hasilnya oleh fasilitator

MODUL III

DERRADIKALISASI

ANTARA MITOS DAN FAKTA

Deskripsi:

Dalam modul pertama akan dibahas bersama tentang konsepsi pemikiran politik dan keagamaan radikal, terkait dengan terstrukturnya keberadaan pemikiran politik dan radikal dalam kalangan mahasiswa. Pemahaman tentang keberadaan pemikiran politik dan keagamaan radikal antara mitos dan fakta akan menjernihkan pandangan stakeholder organisasi ekstra kampus dalam upaya menciptakan dialog obyektif dengan fihak-fihak yang mempraktikan radikalisasi politik dan keagamaan di Kampus. Sebagai mitos, deradikalisasi dianggap sebagai sesuatu yang “bersifat militeristik”, dan menempatkan actor radikal sebagai orang yang “menyimpang”. Sebagai fakta, mendikursuskan pemikiran radikal politik dan keagamaan secara terbuka akan memoderaisasi pilihan aksi radikal yang destruktif dengan tidak mengurangi idialisasi dalam berfikir.

Tujuan

Peserta pelatihan dapat membaca dan menjelaskan realitas praktik radikalisme pemikiran politik dan keamanan dan mendiskusikannya secara obyektif dan rasional.

Metode

1. Ceramah
2. Curah gagasan
3. Studi Kasus

Bahan Yang Dibutuhkan

1. Komputer dan Viewer
2. Kertas Plano
3. Kertas Metaplan

Waktu

120 menit

Proses Fasilitasi

1. Fasilitator memaparkan selama 15 menit tentang ambiguitas ide deradikalisasi baik dalam dataran konsepsional maupun realitas praktik, dalam konteks sebagai sesuatu yang wajar dan normal maupun sebagai sesuatu yang patologis dan tidak normal.
2. Peserta memperhatikan, bertanya ataupun memberikan komentar atas paparan singkat dari fasilitator
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok besar untuk mendiskusikan beberapa model deradikalisasi yang dijalankan oleh sejumlah Negara.
4. Masing–masing kelompok mendiskusikan relasi social antara pelaku yang melakukan deradikalisasi, dan pihak yang dijadikan target deradikalisasi. Termasuk sejumlah efek samping dari program deradikalisasi terhadap masyarakat dan kelompok keagamaan tertentu.
5. Kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok kepada *floor* dengan dipandu oleh Fasilitator sebagai moderator untuk menformulasikan argument tentang arti penting pencegahan praktik radikalisme di sekolah
6. Fasilitator melakukan wrap up terhadap hasil diskusi untuk dijadikan bahan untuk kajian berikutnya.

Sistem Evaluasi:

1. Fasilitator mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta dengan memberikan pertanyaan kepada peserta secara acak untuk pertanyaan essai yang disampaikan secara verbal.
2. Fasilitator mengevaluasi pencapaian peserta dengan memberikan pertanyaan tertulis untuk kemudian direkap hasilnya oleh fasilitator

SUPLEMEN MATERI:

1. Radikalisme dan Deradikalisasi antara Mitos dan Realitas

Radikal merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*radict*” yang artinya dasarnya adalah akar. Merujuk dari kamus Bahasa Indonesia, radikal didefinisikan sebagai kecenderungan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu secara mendasar. Sedangkan radikalisasi merupakan tindakan yang menimbulkan sikap radikal di tengah masyarakat.¹ Lembaga Survei Indonesia (LSI), mengadakan riset nasional, untuk mengeksplorasi radikalisme pada tingkat muslim dewasa di Indonesia di tahun 2010. Dalam riset ini diperoleh data mengenai masyarakat yang pernah dan bersedia melakukan tindakan radikal sebagai berikut:

¹ <http://sosbud.kompasiana.com/2010/12/10/urgensi-deradikalisasi-di-indonesia/> yang diunduh pada 12 April 2011 atau untuk kajian lebih dalam tentang radikalisme dalam Zada, K. (2003). *Islam radikal: Pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia* Jakarta: Teraju.

Tabel 1
Ragam Tindakan Yang Mengekspresikan
Kecenderungan Radikal

| No | Tindakan | Prosentase |
|----|---|------------|
| 1 | Razia dan Sweeping tempat maksiat | 2,6% |
| 2 | Bersedia Melakukan razia dan sweeping tempat maksiat | 26,3% |
| 3 | Demonstrasi Terhadap Kelompok Lain | 1% |
| 4 | Bersedia Melakukan Demonstrasi Terhadap Kelompok lain | 26,9% |
| 5 | Menyumbang Materi Untuk Penegakan Syariat Islam | 37.4% |
| 6 | Melakukan Penyerangan Rumah Ibadah | 1.3% |
| 7 | Mengajak Orang lain agar mengikuiti pemikirannya | 18.8% |

Sumber: Lembaga Survai Indonesia, 2010.

Pemikiran radikal memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap kelompok anak muda dan kelompok mahasiswa. Studi yang dilakukan oleh Surwandono dan Sidiq Ahmadi terhadap gejala tumbuhnya pemikiran radikal cukup menarik yakni aktivis organisasi ekstra kampus lebih tertarik untuk mendiskusikan kepada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat diametral, apakah kanan-politik (fasisme, totalitarianism), kanan-agama (fundamentalisme), kiri-politik (sosialisme, komunisme), kiri-agama (kiri Islam, teologi

pembebasan), maupun liberal politik (liberalism), maupun liberal agama (liberalisasi)² daripada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat moderat. Pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat ekstrim difahami akan memberikan horizon berfikir yang luas sehingga akan ditemukan solusi-solusi atas persoalan social politik yang selama ini mengalami kebuntuan karena sempitnya horizon berfikir. Pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal juga dianggap sebagai narasi yang paling efektif untuk melakukan counter hegemoni terhadap dominannya pemikiran global yang berbasis liberalis-kapitalis.³

Dalam konteks politik di kampus, studi dari Surwandono dan Sidiq Ahmadi menunjukkan bahwa organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan pemikiran keagamaan dan politik cenderung memilih struktur pemikiran politik yang berbasis radikal kritis, yang terdiri dari;

Pertama, Pemikiran-pemikiran **politik yang berbasis kiri**, baik yang kiri radikal maupun kiri kritis,⁴ menjadi salah satu referensi utama dari hampir semua

² Lihat klasifikasi spectrum pemikiran politik dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Penerbit Radjawali, 2003

³ Surwandono, Sidiq Ahmadi, Pelembagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskusikan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta, Laporan Penelitian Hibah Bersaing (tidak diterbitkan), Yogyakarta, Fisipol UMY, 2010

⁴ Karl Mark, Frederich Engel sebagai basis normative pemikiran kiri kritis, yang kemudian muncul pemikiran kiri dari Hasan Hanafi, Moh Arkoun , ataupun pemikiran revolusioner seperti teologi pembebasan yang dibawa oleh Castro, maupun Che Guevara.

organisasi ekstra kampus. Pilihan untuk mengkonsumsi pemikiran yang berbasis kiri, dalam banyak kasus sebagai pilihan yang tak terhindarkan di tengah semakin derasnya pemikiran politik liberal yang diadopsi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kedua, pemikiran politik yang berbasis **kanan keagamaan**, baik yang bersifat moderat-adaptif dan radikal-revolusioner sedemikian rupa juga menjadi alternative sumber pemikiran. Pemikiran kanan revolusioner yang memandang sesuatu secara diskrit, difahami oleh beberapa aktivis organisasi ekstra kampus sebagai alternative eksplanasi realitas social yang yang rumit dan kompleks menjadi lebih sederhana.⁵

Ketiga, corak pemikiran radikal bebas, di mana kemudian menempatkan sesuatu *rule of law* sebagai sesuatu yang nisbi. Filsafat eksistensialisme yang menjadi rujukan semangat radikal dalam kebebasan ini menyebabkan segala tindakan agen dan struktur dalam masyarakat dikelola dengan hukum *permisivisme*. Filsafat eksistensialisme ini menjadi rujukan berfikir juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi organisasi ekstra kampus yang mulai sepi peminat. Mengembangkan pemikiran yang berwatakan radikal permisivisme difahami akan memberikan daya

⁵ Lihat pemikiran kanan keagamaan radikal dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 2003 ataupun dalam Muhammad Asfar (ed). *Islam lunak, Islam radikal: Pesantren, terorisme, dan bom Bali*, Surabaya: JP Press.

undang yang besar sehingga mahasiswa tertarik untuk bergabung dengan organisasi ekstra kampus.

Tumbuh dan berkembangnya pemikiran radikal di kampus, pada awalnya tidak menyebabkan persoalan yang serius. Berfikir radikal Yes, Bertindak Radikal No, demikian jargon yang sering diaktualkan oleh para aktivis organisasi ekstra kampus dalam melakukan diskursus pemikiran. Namun akhir-akhir ini, gejala radikalisasi pemikiran di kampus mengalami perubahan yang signifikan di mana terdapat sekelompok aliran politik dan keagamaan melakukan infiltrasi pemikiran radikal kepada para mahasiswa. Hasilnya cukup mengejutkan banyak kalangan, bahwa banyak mahasiswa menjadi korban dari indoktrinasi pemikiran dan aksi radikal dari kelompok politik dan agama tertentu. Bahkan para pelaku tindak kekerasan dan terror di Indonesia pada tahun 2010-2011 diperankan oleh para mahasiswa maupun sarjana yang baru lulus dari kampus.⁶

⁶ Dalam diskursus kekinian, kelompok politik keagamaan tersebut dihubungkan dengan kelompok NII. Lihat lebih jauh dinamika pemikiran radikal dalam ⁶ Shireen T Hunter, *Islamic Revivalism: Unity and Diversity*, Bloomington, 2003, Azyumardi Azra, ibid.

MODUL IV

BENTUK-BENTUK DE-RADIKALISASI

Deskripsi:

Dalam modul kedua akan dibahas bersama tentang bentuk-bentuk program deradikalisasi, guna menjernihkan duduk persoalan radikalisis sebagai sesuatu yang normal atau sebagai sesuatu yang patologis. Pembahasan juga akan menelisik secara mendalam tentang praktik deradikalisasi dalam konteks structural di mana terkait dengan kompetisi antar struktur yang pro-deradikalisasi dan anti-deradikalisasi maupun praktik radikalisis dalam konteks kultural di mana terkait dengan derajat toleransi terhadap praktik radikalisis dalam masyarakat.

Tujuan

Peserta pelatihan dapat mengetahui bentuk-bentuk program de-radikalisasi di banyak Negara, dan pengalaman historis Indonesia dan mampu mengidentifikasi factor structural dan cultural dalam praktik radikalisis.

Metode

- 1) Ceramah
- 2) Curah gagasan
- 3) Studi Kasus

Bahan Yang Dibutuhkan

- 1) Komputer dan Viewer
- 2) Kertas Plano
- 3) Kertas Metaplan

Waktu

120 menit

Proses Fasilitasi

- 1) Fasilitator memaparkan selama 15 menit tentang bentuk-bentuk dan model de-radikalisasi yang dijalankan di sejumlah Negara, dari yang berbasis represif-militeristik, sampai dengan persuasive-dialogis.
- 2) Peserta memperhatikan, bertanya ataupun memberikan komentar atas paparan singkat dari fasilitator.
- 3) Fasilitator membagi peserta ke dalam 2 kelompok besar untuk mendiskusikan beberapa kasus deradikalisasi di Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, dan Indonesia dengan menggunakan pendekatan structural maupun cultural.

- 4) Masing–masing kelompok mendiskusikan relasi social antara pelaku radikalisme dan de-radikkalisasi dalam konteks structural maupun cultural.
- 5) Kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok kepada *floor* dengan dipandu oleh Fasilitator sebagai moderator untuk menformulasikan argument tentang arti penting memahami praktik deradikalisasi yang persuasif dan dialogis. Fasilitator melakukan wrap up terhadap hasil diskusi untuk dijadikan bahan untuk kajian berikutnya.

Sistem Evaluasi:

- 1) Fasilitator mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta dengan memberikan pertanyaan kepada peserta secara acak untuk pertanyaan essai yang disampaikan secara verbal.
- 2) Fasilitator mengevaluasi pencapaian peserta dengan memberikan pertanyaan tertulis untuk kemudian direkap hasilnya oleh fasilitator

SUPLEMEN MATERI:

Meningkatnya aktivitas intoleransi, kekerasan dan terror di Indonesia mencerminkan bahwa banyaknya anggota masyarakat yang terpengaruh oleh logika berfikir dari kelompok radikal dan melakukan aktivitas intoleransi, kekerasan, terror atas nama kekuatan agama dan politik tertentu adalah sebagai sesuatu yang normal. Bahkan studi yang dilakukan oleh Petrus Golose, Ketua BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menunjukkan bahwa para pelaku tindakan kekerasan dan terror tidak merasa takut atas ancaman hukuman jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁷

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan serangkaian program untuk menata dan mengendalikan ideologi radikal, kekerasan dan terror dengan program deradikalisasi. Menurut Sri Yunanto program deradikalisasi mencakup berbagai komponen proses; deideologisasi reorientasi, motivasi, re-edukasi, resosialisasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Maka program deradikalisasi sebagai sebuah program pendidikan bisa mempunyai dimensi kognitif, dalam bentuk memasukkan faham yang tidak radikal untuk menghilangkan atau melepas pemikiran, sikap dan tindakan radikal dan kemudian menggantikannya

⁷ Lihat studi Petrus Golose, *Deradikalisasi terorisme : humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010

dengan faham Islam yang toleran, compatible dengan kehidupan bangsa yang plural. Program deradikalisasi juga mempunyai dimensi afeksi, yaitu melakukan persuasi dengan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi agar mereka dengan sadar dan senang kembali kepada masyarakat, Islam dan motorik dalam bentuk meninggalkan perilaku dan dukungan terhadap kekerasan.⁸

Studi yang dilakukan oleh Sri Yunanto terhadap program deradikalisasi justru menimbulkan persoalan serius, bahkan semakin memicu penyebaran pemikiran radikal. Selama ini program deradikalisasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan keamanan, dan pendekatan penegakan hukum dan kurang menggunakan pendekatan melalui jalur budaya dan pendidikan relative belum banyak dieksplorasi. Pendekatan keamanan dan hukum cenderung mengedepankan unsur represif, sedangkan pendekatan budaya dan pendidikan mengedepankan unsure preventif dan humanis.

Ketua Majelis Ulama KH Makruf Amien yang mengatakan bahwa program deradikalisasi yang salah justru akan memicu radikalisme⁹ Hal ini terkait dengan adanya pandangan bahwa program deradikalisasi merupakan sebuah program karet untuk memarginalkan peran politik masyarakat Islam, bahkan dikhawatirkan akan

⁸ Lihat tulisan Sri Yunanto, . (ed). (2003). *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: Ridep Institute. Atau dalam <http://idsps.org/headline-news/publikasi-idsps/tantangan-program-deradikalisasi-terorisme/>, yang diunduh pada 15 April 2011

⁹ Republika, Senin 1 November 2010.

mengakibatkan pendangkalan akidah bagi kalangan umat Islam. Kebijakan deradikalisasi yang tidak dipersiapkan secara matang justru akan menimbulkan mis-interpretasi dan mis-komunikasi yang berpeluang menciptakan radikalisme sendiri.¹⁰ .Noorhuda Ismail, mempunyai sikap yang skeptis terhadap konsepsi deradikalisasi dalam perspektif mengubah pemikiran yang radikal. Dalam pandangannya yang lebih penting bukan merubah pemikiran yang radikal melainkan membuat mereka mandiri secara ekonomi dan menjauhkan diri dari kekerasan (disengagement from violence).¹¹

Salah satu model deradikalisasi yang berhasil menurut Leo Suryadinata adalah program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Belanda dalam batas tertentu berkontribusi terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia, di mana tokoh Sneevliet merupakan tokoh dari Belanda yang mengenalkan tradisi radikalisme di Indonesia. Pandangan Sneevliet kemudian mengubah struktur social dalam organisasi Sarekat Islam yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto menjadi terpecah

¹⁰ Hal ini tercermin dalam sikap Hizbut Tahrir Indonesia dalam mengomentari program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Lihat pandangan HTI, Harist Abu Ulya, **Latar Belakang Munculnya Strategi Deradikalisasi** (Menguak Target dan Tujuan Yang Sebenarnya), dalam <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/latar-belakang-munculnya-strategi-deradikalisasi.htm> yang diunduh pada 10 April 2011

¹¹Republika, Rabu , 6 Oktober 2010

dalam organisasi SI Putih di bawah kepemimpinan Agus Salim, dan SI Merah di bawah kepemimpinan Semaun.

Menurut Leo Suryadinata, program deradikaliasi yang didesain oleh pemerintah Belanda dengan melibatkan para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama. Froukje Demant merupakan peneliti radikalisme yang terkenal. Dia menyarankan agar pemerintah Belanda yang sekuler lebih terbuka untuk argumen-argumen religius dan kaum muslim moderat harus mengajak sesama muslim yang radikal masuk ke *mainstream* Islam yang damai. Pemberian ruang kepada fihak-fihak yang akan menjadi obyek radikalisasi untuk menyampaikan argumentasi dari keyakinan yang dipilihnya akan membuat arus keterbukaan komunikasi.¹²

Bagaimana mendesain program deradikalisasi yang efektif dan efisien? Proses melakukan deradikalisasi dapat meminjam logika konstruktivisme yang dipergunakan oleh Antony Giddens untuk melacak relasi antara agen dan struktur. Pemikiran radikal dapat dianalogkan sebagai struktur, dan pelaku aktivitas kekerasan sebagai representasi agen. Struktur pemikiran radikal membentuk cara pandang dan perilaku agen dalam memaknai sesuatu. Struktur yang kuat dan berhirarkhi membuat agen tidak memiliki kesempatan untuk mengabaikan apa-apa yang menjad harapan dan keinginan agen. Semakin terjadi

¹² Lihat pandangan Leo Suryadinata dalam http://www.balipost.co.id/mediadeta_il.php?module=detailrubrik&kid=1&id=2490 yang diunduh pada 1 April 2011

ketimpangan kekuatan, otoritas, informasi antara struktur dan agen maka semakin posisi agen hanya menjadi subordinat dari kepentingan struktur. Menurut Giddens, dalam konteks tertentu perilaku struktur dapat dipengaruhi oleh perilaku agen, atau dalam hal ini agen justru yang mengkonstruksi perilaku struktur. Agen yang memiliki kekuatan yang memadai, memungkinkan perilaku agen akan otonom, bahkan agen dapat mempengaruhi perubahan di dalam struktur sehingga perilaku agen kemudian berharmoni dengan perilaku struktur.¹³

¹³ Lihat Antony Giddens dalam Antony Giddens *Central Problems in Social Theory*, Berkeley: University of California Press, 1979 dan Antony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge, U.K.: Polity Press, 1984. Atau dalam Lihat dalam Alexander E. Wendt, "**The Agent-Structure Problem in International Relations Theory**", *International Organization*, Vol. 41, No. 3. (Summer, 1987), pp. 335-370

MODUL V

STRUKTURASI RADIKALISME DI KAMPUS

Deskripsi:

Dalam modul kedua akan dibahas bersama tentang factor-faktor yang menyebabkan praktik radikal marak di kampus. Fokus kajian pada modul ini lebih menitikberatkan kepada pendekatan structural. Pendekatan Struktural mengasumsikan bahwa berlangsungnya praktik radikal lebih disebabkan keberadaan maraknya ide radikal yang mengakar kuat, menawarkan pemikiran alternatif anti struktur, anti keamanan dan memiliki sejumlah infra-struktur yang memadai, baik di dalam kampus dan luar kampus. Pembahasan juga akan menelisik terhadap struktur-struktur di kampus yang potensial menjadi penyebab terjadinya praktik radikalisme politik dan keagamaan.

Tujuan

Peserta pelatihan dapat mengidentifikasi struktur di lingkungan internal dan eksternal kampus yang berpotensi menjadi penyebab maraknya praktik radikal.

Metode

- 1) Ceramah
- 2) Curah gagasan
- 3) Studi Kasus

Bahan Yang Dibutuhkan

- 1) Komputer dan Viewer
- 2) Kertas Plano
- 3) Kertas Metaplan

Waktu

120 menit

1) Proses Fasilitasi

- 2) Fasilitator memaparkan selama 15 menit tentang teori Strukturasi dari Antony Giddens untuk dipergunakan menganalisis munculnya praktik radikal politik dan keagamaan di kampus.
- 3) Peserta memperhatikan, bertanya ataupun memberikan komentar atas paparan singkat dari fasilitator.
- 4) Fasilitator membagi peserta ke dalam 2 kelompok besar untuk mendiskusikan struktur pemikiran politik dan keagamaan yang radikal di lingkungan internal dan eksternal kampus.
- 5) Masing-masing kelompok mendiskusikan relasi social antara struktur dan agen dari praktik radikal.

- 6) Kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok kepada *floor* dengan dipandu oleh Fasilitator sebagai moderator untuk membuat matrik penyebab praktik radikal dari pendekatan strukturasi
- 7) Fasilitator melakukan wrap up terhadap hasil diskusi untuk dijadikan bahan untuk kajian berikutnya.

Sistem Evaluasi:

- 1) Fasilitator mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta dengan memberikan pertanyaan kepada peserta secara acak untuk pertanyaan essai yang disampaikan secara verbal.
- 2) Fasilitator mengevaluasi pencapaian peserta dengan memberikan pertanyaan tertulis untuk kemudian direkap hasilnya oleh fasilitator

SUPLEMEN MATERI TEORI STRUKTURASI

Kajian tentang teori strukturisasi telah dilakukan oleh Antony Giddens. Giddens mencoba melakukan penyatuan analisis dari pendekatan yang selama ini banyak dihadap-hadapkan, yakni pendekatan yang berbasis struktur yang selama ini telah diinisiasi oleh Talcott Parson, di mana lebih mengedepankan prinsip positivisme, dengan pendekatan yang berbasiskan pada individu di mana mengedepankan prinsip hermeneutik, dan subyektivisme.

Giddens juga memetakan teori strukturasinya dalam relasi antara agen dan struktur. Agen seringkali didekatkan dengan aktivitas individu yang unik dan spesifik, sedangkan struktur didekatkan dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaga dalam masyarakat. Dua actor ini sesungguhnya saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam konteks dipengaruhi ataupun mempengaruhi.

Giddens mempercayai bahwa perilaku individu sesungguhnya tidak hanya sebagai ekspresi individu secara unik dalam mengartikulasikan kepentingannya. Namun, perilaku individu dalam batas tertentu juga dibentuk oleh tatanan yang berkembang dalam masyarakat. Dominannya kekuatan masyarakat membuat individu menjadi tidak punya pilihan. Sehingga perilaku individu justru dikonstruksi oleh struktur. Individu hanya menjalankan ekspektasi yang diharapkan dari struktur. Giddens menolak bahwa perilaku

individu sebagai sesuatu yang bersifat “*given*”, namun sebagai fenomena baru yang dikonstruksi.

Bagaimana dengan struktur itu sendiri. Tatanan masyarakat, sesungguhnya juga bukan sebagai sesuatu yang *given*, sebagaimana perilaku individu. Tatanan dalam masyarakat sesungguhnya sebagai bentuk pelebagaan kebiasaan atau *habits* dari individu yang telah berlangsung lama, berkembang menjadi *mores*, *folkways*, dan *konvensi*. Sehingga menurut Giddens, *human agency dan struktur sosial* berhubungan satu sama lain. Tindakan-tindakan yang berulang-ulang (repetisi) dari agen-agen individual-lah yang mereproduksi struktur tersebut.

Berangkat dari asumsi inilah, relasi antara Struktur dan agency tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan dasar, misalnya, orang menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama orang juga dikungkung dan dibatasi (*constrained*) oleh masyarakat. Struktur diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk yang bermakna (*meaningful form*) hanya melalui kerangka struktur. Jalur kausalitas ini berlangsung ke dua arah timbal-balik, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menentukan apa yang mengubah apa. Struktur dengan demikian memiliki sifat membatasi (*constraining*) sekaligus membuka kemungkinan (*enabling*) bagi tindakan agen.¹⁴

¹⁴ Satrio Arismunandar, **Teori Strukturasi sebagai “Jalan Tengah”**, yang diposkan oleh M. Farhan Ramli S. Sos, M.Si

Kesadaran Diskursif, Kesadaran Praktis, dan Motif/Kognisi Tak sadar

Dalam teori strukturasi Giddens, agen memiliki tiga tingkatan kesadaran:

- 1) Kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Yaitu, apa yang mampu dikatakan atau diberi ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Kesadaran diskursif adalah suatu kemawasdirian (*awareness*) yang memiliki bentuk diskursif.
- 2) Kesadaran praktis (*practical consciousness*). Yaitu, apa yang aktor ketahui (percayai) tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Namun hal itu tidak bisa diekspresikan si aktor secara diskursif. Bedanya dengan kasus ketidaksadaran (*unconscious*) adalah, tidak ada tabir represi yang menutupi kesadaran praktis.
- 3) Motif atau kognisi tak sadar (*unconscious motives/cognition*). Motif lebih merujuk ke potensial bagi tindakan, ketimbang cara (mode) tindakan itu dilakukan oleh si agen. Motif hanya memiliki kaitan langsung dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa, yang menyimpang dari rutinitas. Sebagian besar dari tindakan-tindakan agen sehari-hari tidaklah

secara langsung dilandaskan pada motivasi tertentu.¹⁵

Radikalisme dan Strukturasi

Dalam konteks teori strukturasi, fenomena radikalisme sesungguhnya juga merupakan kombinasi interaksi antara individu pelaku radikalisme dengan tatanan masyarakat (baik pihak yang mengetahui adanya radikalisme, (bystander) ataupun peraturan yang berlaku di dalam masyarakat), dan kondisi fisik dan psikologis dari korban. Perilaku agen radikal untuk melakukan radikalisme sebagai bentuk agresi terhadap pihak lain sebagai sarana mengartikulasikan kepentingan dan kepribadiannya. Jika perilaku radikalisme tersebut tidak mendapatkan complain dari berbagai pihak dalam masyarakat sesungguhnya dalam masyarakat tersebut sudah terdapat struktur radikal. Sehingga dalam bahasa dari Giddens, para pelaku bullyer sebagai agen telah melembagakan praktik radikalisme sebagai kebiasaan yang normal dan wajar.

Pada sisi yang lain, perilaku radikalisme juga dibentuk oleh struktur kekerasan itu sendiri. Para radikalist sesungguhnya sebagai agen dari struktur kekerasan. Para radikal tidak memiliki alternative perilaku untuk memenuhi ekspektasi dari struktur kekerasan. Ketika makin banyak agen mengadopsi cara-cara mapan atau rutinitas keseharian dalam melakukan sesuatu, mereka sebenarnya telah memperkuat tatanan

¹⁵ Ibid.

struktur (order).¹⁶ Radikalisme justru telah menjadi instrument dari struktur untuk menciptakan tertib social. Sehingga dalam bahasa Giddens, struktur telah melembagakan perilaku radikalisme melalui agen-agen radikal.

Dari pembacaan terhadap teori strukturasi, tercermin bahwa potensi-potensi praktik radikalisme sedemikian lebar. Perilaku radikalisme tidak semata hanya dilakukan oleh individu semata, namun jang-jangan telah terlembagakan dalam struktur masyarakat yang sedemikian ramah dengan praktik radikalisme. Struktur dalam batas tertentu menjadi agen radikalisme, karena struktur justru memberikan pelembagaan bagi praktik radikalisme..

¹⁶ Ibid.

MODUL VI

MENDISKURSUSKAN DE-RADIKALISASI PEMIKIRAN POLITIK DAN KEAGAMAAN DI KAMPUS

Deskripsi:

Dalam modul keempat, akan dibahas tentang proses mendiskusikan Deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan dengan pendekatan kultural yang persuasive dan dialogis, sehingga seringkali dapat membuka ruang diskusi bersama tentang radikalisme politik dan keagamaan dalam ruang akademik, yang dapat membantu pola fikir mahasiswa dalam bertindak. Pembahasan juga tentang alternative tema diskursus dan metode mendiskusikannya.

Tujuan

Peserta pelatihan dapat mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan secara produktif dan efisien.

Metode

- 1) Ceramah
- 2) Curah gagasan
- 3) Studi Kasus

Bahan Yang Dibutuhkan

- 1) Komputer dan Viewer
- 2) Kertas Plano
- 3) Kertas Metaplan

Waktu

120 menit

Proses Fasilitasi

- 1) Fasilitator memaparkan selama 15 menit tentang metode mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan dengan pendekatan persuasif dan dialogis.
- 2) Peserta memperhatikan, bertanya ataupun memberikan komentar atas paparan singkat dari fasilitator.
- 3) Fasilitator membagi peserta ke dalam 2 kelompok besar untuk mendiskusikan tentang pandangan minor terhadap deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan, dan alternatif untuk membangun diskursus deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan yang produktif dan efisien.

- 4) Kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok kepada *floor* dengan dipandu oleh Fasilitator sebagai moderator untuk menginventarisasi factor-faktor penentu, penghubung, untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah.
- 5) Fasilitator melakukan wrap up terhadap hasil diskusi untuk dijadikan bahan untuk kajian berikutnya.

Sistem Evaluasi:

- 1) Fasilitator mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta dengan memberikan pertanyaan kepada peserta secara acak untuk pertanyaan essai yang disampaikan secara verbal.
- 2) Fasilitator mengevaluasi pencapaian peserta dengan memberikan pertanyaan tertulis untuk kemudian direkap hasilnya oleh fasilitator

MODUL VII

RENCANA TINDAK LANJUT

DESKRIPSI

Rencana tindak lanjut merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para peserta pelatihan untuk menyusun beberapa program mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di kampus. Peningkatan kapasitas dari peserta terhadap manajemen mendiskusikan *deradikalisme* pemikiran politik dan keagamaan di kampus dengan menggunakan prinsip analisis dasar strukturisasi diharapkan dapat didesiminasikan sebagai program *de-radikalisasi* di kampus. Implementasi dari program mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan diharapkan akan mampu membentengi mahasiswa dari pengaruh negatif pemikiran radikal dalam politik dan keagamaan.

TUJUAN

Peserta membuat perencanaan program pasca pelatihan di organisasi masing-masing

METODE

Diskusi kelompok
Presentasi

WAKTU

60 menit/ 1 jam

ALAT-ALAT YANG DIBUTUHKAN

Kertas Plano
Metaplan
Spidol

PROSES FASILITASI

- 1) Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini tentang pentingnya tindak lanjut dari proses pelatihan dengan menyusun rencana program yang akan dilakukan oleh peserta
- 2) Fasilitator membagi peserta dalam kelompok berdasarkan organisasi
- 3) Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang perencanaan program yang terdiri dari bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, input Masing-masing

kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam forum pleno

- 4) Fasilitator menegaskan bahwa proses desiminasi program mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di organisasi kemahasiswaan akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi kemahasiswaan berbasis Islam dalam berkompetisi dengan actor politik yang mengembangkan pemikiran dan aksi politik dan keagamaan secara radikal.

